

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut (PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014- PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA, 2014), Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam menjalankan pemerintahannya desa memiliki kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa yang bekerja untuk desa, peran kepala desa dalam menjalankan pemerintahan desa antara lain sebagai pemimpin jalannya pemerintahan desa, mengkoordinasi pembangunan desa, dan mengawasi kehidupan masyarakatnya di segala bidang. Proses pemilihan kepala desa yaitu melalui PILKADA (Pemilihan Kepala Daerah) yang langsung di pilih oleh masyarakat desa di setiap desa masing-masing, jika sudah terpilihnya kepala desa akan diangkat dan dilantik oleh bupati. Jabatan kepala desa memiliki masa menjabat yaitu 6 tahun dan jika kepala desa sudah habis dalam masa jabatannya di perbolehkan untuk menjabat kembali paling maksimal tiga kali dan boleh berturut-turut atau tidak berturut-turut dimana itu semua sudah di atur dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 39. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan sub sistem dari penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya (Widjaja, 2013). Desa adalah perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik, serta kultural yang terdapat di suatu daerah dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain(R.Bintarto, 2014).

Dalam fenomena yang di temui oleh penulis sendiri menemukan fenomena kepemimpinan Kepala Desa di Desa Bangunasri, Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan, dimana kepala desa ini memiliki latar belakang dinasti

politik. selama 3 periode berturut-turut di kursi jabatan kepala desa diisi oleh satu keluarga dan bahkan suami istri yaitu periode pertama dijabat oleh suami kemudian istri menjabat periode setelahnya dan yang berjalan di periode saat ini kembali lagi ke suami yang menjabat. Penjelasan singkatnya dinasti politik yaitu sebagai mempertahankan kekuasaan atau penerapan kekuasaan di keluarganya atau yang masih berbau keluarga dimana membentuk sanak *family* di pemerintahan, guna meneruskan atau mewariskan tradisi dinasti politik, tetapi dalam penelitian ini tidak membahas tentang dinasti politiknya dan lebih fokus terhadap kepemimpinan Kepala Desa.

Pemimpinan atau leadership harus memiliki beberapa kriteria kepemimpinan yaitu seorang pemimpin harus memiliki sifat-sifat kepemimpinan yang sudah diberikan dalam dirinya. Kepemimpinan memerlukan serangkaian sifat atau watak tertentu yang menjamin keberhasilan. Keberhasilan seorang pemimpin terletak pada kepribadian (*personality*) seorang pemimpin itu sendiri. Munculnya pemimpin dari waktu, tempat dan keadaan, seseorang yang dapat dikatakan pemimpin terlihat dari tantangan atau kejadian penting yang bisa seseorang ini lewati. Maka dari itu kepemimpinan akan berhasil jika sang pemimpin mampu melewati tantangan saat itu. Seseorang tidak dapat dikatakan sebagai seorang pemimpin hanya dengan sifat-sifat yang dimilikinya, kriteria pemimpin yang sesuai atau ideal tidak hanya terpaku pada sifat yang ada dalam diri pemimpin, namun sifat yang dimilikinya dapat menggunakan dirinya dalam menghadapi situasi dan kondisi apapun untuk menghadapi tantangan-tantangannya (Pamudji, 1986).

kepemimpinan adalah suatu proses kegiatan seseorang untuk menggerakkan orang lain dengan memimpin, membimbing, memengaruhi oranglain, untuk melakukan sesuatu agar dicapai hasil yang diharapkan. Kepemimpinan menurut ahli diatas dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan itu bersifat menggerakkan atau memberikan pengaruh terhadap mereka yang dipimpin untuk mencapai tujuan visinya (Prof.Dr.H.Edy Sutrisno, 2013) kepemimpinan Kepala Desa Bangunasri ini tentunya memiliki outpu terhadap masyarakat yang mengalami kebijakan yang dipimpin oleh Kepala Desa Bangunasri.

Dari uraian diatas cukup menjelaskan arah dari penelitian ini dan apa saja yang melatarbelakangi tujuan penelitian ini, maka peneliti menentukan judul penelitian ini dengan **PERSEPSI MASYARAKAT TERKAIT KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DI DESA BANGUNASRI KECAMATAN BARAT KABUPATEN MAGETAN.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan masalah-masalah yang ditemukan oleh peneliti munculah suatu rumusan masalah yaitu Bagaimana persepsi masyarakat terkait kepemimpinan Kepala Desa di Desa Bangunasri Kecamatan Barat Kabupaten Magetan.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang ditemukan oleh peneliti. Dimana tujuan penelitian ini untuk mengetahui pendapat masyarakat terhadap kepemimpinan Kepala Desa Bangunasri.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan dan pengalaman maupun wawasan yang lebih luas bagi penulis serta menjadi bahan masukan dan untuk menjadi manfaat peneliti selanjutnya dalam mengembangkan penelitian ini.

2. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dapat menjadikan referensi oleh mahasiswa lainnya yang akan meneliti hal serupa dan bisa menjadikannya bahan acuan untuk mengembangkan penelitian terkait, selain itu penelitian ini untuk menambah wawasan dan pengetahuan.

3. Bagi Desa

Penelitian ini dapat memberikan wawasan terhadap desa sebagai kesejahteraan bersama dan dapat mengetahui keinginan masyarakat terhadap kepemimpinan kepala desa.

E. Penegasan Istilah

1. Persepsi

Menurut (Robbins, 2010) persepsi adalah proses yang digunakan individu mengelola dan menafsirkan kesan indera mereka dalam rangka memberikan makna kepada lingkungan mereka. Meski demikian apa yang dipersepsikan seseorang dapat berbeda dari kenyataan obyektif. Sesuai pejabaran para ahli di atas dapat diartikan bahwa persepsi adalah pendapat orang lain terhadap suatu kejadian yang bersifat relatif dan persepsi setiap individu atau seseorang akan berbeda. Persepsi adalah suatu proses yang didahului oleh pengeinderaan, yaitu suatu proses yang diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau disebut proses selanjutnya merupakan proses persepsi (Walgito, 2010).

2. Kepemimpinan

Menurut (Prof. Dr. H. Edy Sutrisno, 2013) kepemimpinan adalah suatu proses kegiatan seseorang untuk menggerakkan orang lain dengan memimpin, membimbing, memengaruhi orang lain, untuk melakukan sesuatu agar dicapai hasil yang diharapkan. Kepemimpinan menurut ahli di atas dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan itu bersifat menggerakkan atau memberikan pengaruh terhadap mereka yang dipimpin untuk mencapai tujuan visinya.

F. Landasan Teori

1. Kepemimpinan Kepala Desa

Kepemimpinan diartikan sebagai pengaruh yakni seni atau proses mempengaruhi orang lain sehingga mereka akan berusaha rela dan berusaha terhadap tujuan pencapaian kelompok untuk mencapai tujuan yang belum disepakati sebelumnya. Berarti sikap seseorang tercipta karena meniru sikap orang lainnya yang dihormati, di segani, atau memang ditakutinya, dalam Peraturan Kepemimpinan Desa ada beberapa jenis atau teori kepemimpinan seperti beberapa yang dibawah ini.

Kepemimpinan regresif dapat dimaknai sebagai kepemimpinan yang berwatak otokratis, secara teori otokrasi berarti pemerintahan yang kekuasaan politiknya dipegang oleh satu orang. Salah satu cirinya adalah anti perubahan, terkait dengan perubahan tata kelola baru tentang Desa baik itu Musyarawah Desa, usaha ekonomi bersama Desa dan lain-lain sudah pasti akan ditolak. Desa yang parokhial (hidup bersama berdasarkan garis kekerabatan, agama, etnis atau yang lain) serta Desa-Desa korporatis (tunduk pada kebijakan dan regulasi negara) biasanya melahirkan kepemimpinan seperti ini.

Kepemimpinan konservatif-involutif, merupakan model kepemimpinan ini ditandai dengan hadirnya kepala Desa yang bekerja apa adanya (taken for granted), menikmati kekuasaan dan kekayaan, serta tidak berupaya melakukan inovasi (perubahan) yang mengarah pada demokratisasi dan kesejahteraan rakyat. Kepemimpinan tipe ini pada umumnya hanya melaksanakan arahan dari atas, melaksanakan fungsi kepala Desa secara tekstual sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kepala Desa.

Kepemimpinan inovatif-progresif, kepemimpinan tipe ini ditandai dengan adanya kesadaran baru mengelola kekuasaan untuk kepentingan masyarakat banyak. Model kepemimpinan ini tidak anti terhadap perubahan, membuka seluas-luasnya ruang partisipasi masyarakat, transparan serta akuntabel. Dengan pola kepemimpinan yang demikian kepala Desa tersebut justru akan mendapatkan legitimasi yang lebih besar dari masyarakatnya (Mochammad Zaini Mustakim, 2015).

2. Aturan Kepala Desa

Jabatan kepala desa sudah di atur dalam undang-undang termasuk larangan, ketentuan dan peran kepala desa itu sendiri. Dalam (PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014-PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA, 2014) menegaskan, bahwa perangkat desa diangkat dri warga desa yang memenuhi persyaratan seperti

berpendidikan paling rendah SMA yang sederajat dengan ketentuan umur 20 sampai 42 tahun dan terdaftar sebagai penduduk desa dan paling tidak telah bertempat tinggal di desa tersebut selama 1 (satu) tahun. Dalam pencalonan Kepala Desa diatur dalam (PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014-PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA, 2014) yang menjelaskan bahwa persyaratan untuk mencalonkan kepala desa yaitu :

- a. Warga Negara Republik Indonesia.
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat.
- e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar.
- f. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa.
- g. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran.
- h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara.
- i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.
- j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- k. Berbadan sehat.

- l. Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
- m. Syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Kepala desa di sah-kan dan dilantik oleh bupati atau walikota dan jika dalam pemilihan kepala desa ada perselisihan maka bupati atau walikota yang berhak menyelesaikan perselisihan tersebut. Pasal 40 UU No 6 Tahun 2014 bagian 4 (empat) menjelaskan tentang pemberhentian kepala desa, dalam menjabat kepala desa pastinya tidak diperbolehkan semena-mena jika melakukan perilaku di luar aturan atau ada kejadian yang menjerpa kepala desa di luar dugaan, maka akan di berhentikan. Kriteria kepala desa yang akan di berhentikan menurut undang-undang ialah jika kepala desa meninggal, mengundurkan diri, dan perilaku lain yang dapat menyebabkan kepala desa di berhentikan. Untuk yang berwenang memberhentikan kepala desa adalah bupati atau walikota setempat. Dalam menjalankan kinerjanya kepala desa di bantu oleh perangkat desa yang meliputi seketariat desa, pelaksanaan kewilayahan, pelaksana teknis. dan tugas perangkat desa ini yaitu membantu dalam melayani masyarakat, membantu pembangunan desa, dan menjalankan pemerintahan desa. Tugas dari kepala desa antara lain perencanaan desa, penataan desa, kerja sama desa, pembentukan bumdes. Tugas-tugas yang di bebaskan kepada kepala desa sangat berat, maka dari itu ada persyaratan dalam pencalonan kepala desa, ini cukup menunjukan bahwa tidak sembarangan untuk menjadi kepala desa dan kepala desa di tuntutan untuk mengembangkan kemampuan dalam kepemimpinannya. Dalam kepemimpinannya kepala desa turut menentukan arah program perkembangan desanya untuk mencapai keberhasilan dan memenuhi visi misi desa, dengan itu kepala desa tidak hanya menjanjikan sebuah janji di awal kampanye. (Sudrianmunawar, 2015) pemimpin adalah seseorang yang memiliki kecakapan tertentu yang dapat mempengaruhi para pengikutnya untuk melakukan kerja sama kearah pencapaian tujuan yang telah di tentukan sebelumnya.

3. Persepsi Masyarakat

Pengertian persepsi menurut para ahli. Menurut (Slameto, 2015) persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi kedalam otak manusia, melalui persepsi manusia terus menerus mengadakan hubungan dengan lingkungannya. Hubungan ini dilakukan lewat inderanya, yaitu indera penglihat, pendengar, peraba, perasa, dan pencium. Dalam kamus lengkap psikologi persepsi adalah proses mengetahui atau mengenali objek dan kejadian objektik dengan bantuan indera. Pada dasarnya persepsi mengandung 3 (tiga) aspek atau bisa disebut komponen yaitu komponen afektif, komponen konatif dan komponen kognitif. Sikap seseorang pada suatu objek sikap merupakan manifestasi dari ketiga komponen tersebut yang saling berinteraksi untuk memahami, merasakan dan berperilaku terhadap objek sikap. Persepsi merupakan sebuah aktivitas berupa mengindra, mengintegrasikan, serta memberikan penilaian pada objek-objek fisik ataupun sosial. Penginderaan tersebut biasanya tergantung dari stimulus fisik dan sosial yang berada di dalam lingkungannya. Sensari dari lingkungan ini lah yang akan diolah bersama sama dengan hal lainnya yang sudah dipelajari sebelumnya, baik berupa harapan, nilai, ingatan, sikap dan lainnya. (Adrian, 2010).

Faktor-faktor yang berpengaruh pada persepsi adalah faktor internal perasaan, pengalaman, kemampuan berpikir, motivasi dan kerangka acuan. Sedangkan faktor eksternal adalah: stimulus itu sendiri dan keadaan lingkungan dimana persepsi itu berlangsung. Kejelasan stimulus akan banyak berpengaruh pada persepsi. Bila stimulus itu berwujud benda-benda bukan manusia, maka ketepatan persepsi lebih terletak pada individu yang mengadakan persepsi karena benda-benda yang dipersepsi tersebut tidak ada usaha untuk mempengaruhi yang mempersepsi. Menurut (Rahmat, 2018) bahwa persepsi merupakan pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.

Mengenai pengertian masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara dari wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok, berbagai golongan dan pengawasan tingkah laku serta kebebasan-kebebasan individu (manusia). Keseluruhan yang selalu berubah inilah yang dinamakan masyarakat.(maclver) dan definisi masyarakat sebagai kelompok individu yang diorganisasikan yang mengikuti suatu cara hidup tertentu (Herskovits, 2014).

Persepektif masyarakat sangat di perlukan terhadap fenomena tertentu untuk bahan perbandingan atau perspektif masyarakat digunakan untuk perubahan kedepannya. Peran masyarakat sangat penting dalam sebuah pembangunan dan masyarakat juga andil dalam pembangunan negeri dari perspektif masyarakatlah pemimpin dapat mengetahui seperti apa pemimpin di mata masyarakat yang di pimpinnya.

4. Birokrasi

Birokrasi dianggap max weber sebagai tidak relevan atau tidak rasional. Pejabat yang dari political-will. Berakibat banyak ASN(aparatur sipil negara “salah-urus” atau tidak mencapai hasil secara maksimal. Atas dasar tidak rasional, max kemudian meningkatkan apa yang seharusnya (ideal typhus) melekat di sebuah pemerintahan birokrasi. Tipe ideal (ideal typhus) bagi sebuah otoritas legal diselenggarakan (Wakhid, 2011) :

1. tugas-tugas pejabat diorganisir atas dasar aturan yang berkesinambungan.
2. tugas-tugas tersebut dibagi atas bidang-bidang yang berbeda sesuai dengan fungsi-fungsinya, yang masing-masing dilengkapi dengan syarat otoritas dan sanksi-sanksi.
3. jabatan-jabatan tersusun secara hirarkis, yang disertai dengan rincian hak-hak kontrol dan pengaduan (complaint).
4. aturan-aturan yang sesuai dengan pekerjaan diarahkan baik secara teknis maupun secara legal. Dalam kedua kasus tersebut, manusia yang terlatih menjadi diperlukan.
5. anggota sebagai sumber daya organisasi berbeda dengan anggota sebagai individu pribadi.
6. pemegang jabatan tidaklah sama dengan jabatannya.

7. administrasi didasarkan pada dokumen-dokumen tertulis dan hal ini cenderung menjadikan kantor (biro) sebagai pusat organisasi modern.
8. sistem-sistem otoritas legal dapat mengambil banyak bentuk, tetapi dilihat pada bentuk aslinya, sistem tersebut tetap berada dalam suatu staf administrasi birokratik.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah seperangkat petunjuk yang lengkap tentang apa yang harus diamati dan mengukur suatu variabel atau konsep untuk menguji kesepurnaan. Definisi operasional variabel ditemukan item-item yang dituangkan dalam instrumen penelitian (Sugiarto, 2016) Instrumen yang dapat diukur dan diamati artinya objek memungkinkan peneliti untuk melakukan observasi langsung atau mengukur fenomena secara cermat. Metode ini menggunakan random sampling yang dimana peneliti memilih responden secara acak tidak memilih strata dalam populasi (Sugiyono, 2009) Untuk menentukan permasalahan secara tepat maka di perlukannya definisi operasional sebagai berikut:

- a) Persepsi masyarakat adalah pendapat atau pandangan masyarakat terhadap objek adanya kepemimpinan kepala desa Bangunasri. Melalui wawancara dari masyarakat Desa Bangunasri dapat diketahui jawaban dari masyarakat terkait kepemimpinan Kepala Desa Bangunasri yang ber-latar belakang politik dinasti.
- b) Birokrasi merupakan sekumpulan orang yang bekerja dibalik meja tulis, baik di perkantoran ataupun bidang pemerintahan. (Dr. Muhammad Sawir, S.Sos., M.Si., 2006)

Berdasarkan dua penjelasan diatas dapat dijelaskan bahwa masyarakat yang dituju yaitu masyarakat yang mampu memberikan persepsinya kemudian dari persepsi masyarakat tersebut dikelola dan kemudian ditarik kesimpulan.

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Peneliti dalam melakukan penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif-deskriptif yaitu menurut (Sugiyono, 2009) adalah metode penelitian yang berlandaskan filsafat postpositivisme yang biasa digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci dan melakukan melukiskan suatu keadaan secara objektif atau berdasarkan fakta-fakta yang tampak. Berdasarkan metode penelitian, menurut ahli di atas dapat di jelaskan bahwa peneliti berperan sebagai instrumen kunci yang melakukan penelitian langsung ke objek penelitian. Objek penelitian yang di tuju oleh peneliti disini adalah Desa Bangunasri antara lain balai desa Bangunasri dan masyarakat Bangunasri sebagai objek. Di metode penelitian ini peneliti berperan aktif dalam memuat rencana penelitian.

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian disini adalah di Desa Bangunasri Kecamatan Barat Kabupaten Magetan. Penelitian ini di ambil di desa tersebut dikarenakan di lokasi penelitian terdapat fenomena dan masalah terkait dengan dinasti politik Kepala Desa.

3. Teknik penentuan informan

Menurut (Sugiyono, 2009) penentuan yang biasa digunakan dalam penelitian kualitatif adalah *random sampling*. Dalam penelitian ini, mengidentifikasi informan yang dipilih secara random sampling adalah teknik pengambilan sampel dari anggota populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Beberapa pertimbangan tersebut adalah pemilihan sumber data atau siapa yang dianggap paling mengetahui tentang apa yang diharapkan. Dengan informan kunci yaitu masyarakat Desa Bangunasri Kecamatan Barat Kabupaten Magetan yang dimana berhak memberikan persepsi atau pendapat terkait adanya dinasti politik Kepala Desa.

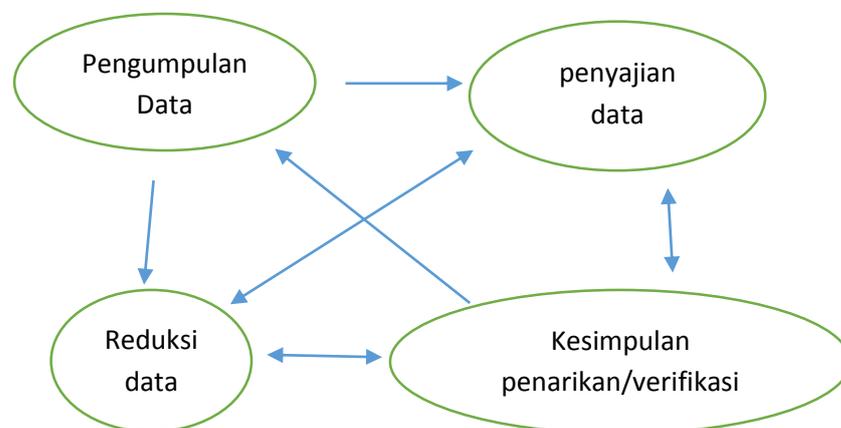
4. Teknik penggalian data

Teknik penggalian data atau pengolahan data dalam deskriptif-kualitatif, maka dari itu melakukan penggalian data dalam bentuk :

- a. Observasi atau pengamatan secara langsung ke tempat penelitian dan mengamati secara langsung fenomena yang ada dengan mendapatkan data dari tempat penelitian, maka dari itu peneliti dapat menyimpulkan secara langsung fenomena.
- b. Wawancara dengan informan guna mendapatkan jawaban langsung terkait persepsi masyarakat
- c. Dokumentasi diperlukan untuk mengambil bukti secara langsung data yang telah di dapat di lapangan, dokumentasi ini dengan metode foto dengan kamera apapun guna mendapatkan fakta yang terjadi di lapangan.
- d. Sumber Data peneliti disini menggunakan 2(dua) data yaitu data primer dan data sekunder :
 - Data primer yaitu data yang di peroleh dari lapangan antara lain data primer datang dari tempat lokasi maupun dari informan lewat wawancara.
 - Data sekunder adalah data yang di dapat dari pra observasi seperti data yang di peroleh dari berita, jurnal, maupun dari data yang sudah ada sebelum penelitian ini di tulis

Berikut skema proses dalam menganalisis data menurut (Miles&huberman, 2014)

Gambar 1. 1 Skema Analisis Data



5. Uji keabsahan

Uji keabsahan data pada kualitatif lebih memfokuskan ke validasi dan reabilitas, ada 3 teknik dalam pemeriksa keabsahan Data :

1. Perpanjangan Keikutsertaan

Perpanjangan keikutsertaan berarti peneliti benar-benar dalam menggali data dilapangan sampai ke titik kejenuhan dan peneliti memahami benar isi dari data tersebut. Sehingga secara pengumpulan proposal sedikit telat.

2. Ketekunan pengamat

Ketekunan disini yang berarti peneliti dalam mengerjakan dan mengola data dengan berbagai refrensi, untuk mencari refrensi dlam mengelola data peneliti memerlukan ketekunan dan konsistensi dalam mengerjakan.

3. Triangulasi

Tringulasi disini memafaatkan peneliti untuk mengecek validasi agar tidak muncul rasa ragu-ragu dalam mengolah data, maka hasil penelitian dikonsulkan ke dosen pembimbing.

Tringulasi dengan melakukan pengecekan kepada metode pengumpulan data yaitu dokumentasi, observasi, dokumentasi.

